

RINGKASAN

Rangkap Jabatan Notaris sebagai Anggota D. P. R., oleh karena itu masalah pokok yang diungkap adalah berupa suatu pernyataan yaitu Rangkap Jabatan Notaris sebagai anggota D. P. R. yang mempunyai sub-sub pokok permasalahan antara lain :

- a. Apakah notaris yang merangkap jabatan D. P. R. tidak bertentangan dengan P. J. N. ?
- b. Apakah akibat hukumnya bagi notaris yang merangkap jabatan D. P. R. bilamana melanggar P. J. N. ?

Secara umum penulisan ini untuk menganalisa landasan hukum P.J.N. bagi notaris yang merupakan hukum positif bagi notaris untuk melaksanakan jabatannya sehari – hari termasuk rangkap jabatan notaris sebagai anggota D.P.R.

Pendekatan masalah yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif karena bersumber pada perundang-undangan, teori-teori, konsep-konsep dan doktrin-doktrin, yang berhubungan dengan permasalahan diatas. Dalam melakukan inventarisasi dan identifikasi bahan hukum digunakan sistem kartu yang penatalaksanaannya dilakukan secara kritis, logis dan sistematis.

Berdasarkan hasil penelitian terungkap bahwa notaris yang telah merangkap jabatan D.P.R., harus mengajukan cuti selama masa jabatan D.P.R. (sesuai pasal 6e P.J.N.) dengan dasar pertimbangan cuti tersebut adalah pasal 6a, 6b, 6c, 6f, 6i dan 6j P.J.N.

Dalam hal cuti tersebut, notaris menunjuk notaris pengganti untuk mengganti notaris melaksanakan tugas dan jabatannya selama masa cuti tersebut.

Bila mana tidak melaksanakan atau melanggar ketentuan-ketentuan diatas, maka notaris tersebut dianggap telah melanggar pasal 50 dan 58 P.J.N., dimana kompetensi Hakim dapat mengenakan hukuman kepada notaris yang bersangkutan.

ABSTRACT

Hold of notary occupation as the of parlement. That's why, the main problem which delivered is form a statement namely hold of notary occupation that have the subs of main problem such as :

- a. Does the notary who hold the position of parlement is not collide with the rule of notary occupation ?
- b. What does the effect of law for the notary who holding the position of parlement if notary will collide the rule notary occupation ?

In general, this thesis is to analyze the law of under layer of the rule of notary occupation for notary that considered as positive law for notary in doing his / her daily occupation included the hold of notary occupation as the member of parlement. The problem approach which used is normative juridische of approach because it sourced of the law, theories, concepts and doctrines that connected with the above problem. In doing the identify of material law is used the card system that it's management with critical, logic and systematic.

From the result of research, it's found that the notary who has held the parlement occupation must award the furlough according with the time of sitting the parlement (article 6e) with the considering basic of articles : 6a, 6b, 6c, 6f and 6j the rule of notary occupation. The furlough of notary must show the substitution notary to change notary doing the task and it's occupation for the notary's furlough .

If the notary doesn't do or collide the above rules, so notary will be considere, that notary has collided the article 50 and 58 the rule of notary occupation where the competention of court can give the funishment to notary who disobey the rule.